

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian studi Ilmu Hubungan Internasional telah mengalami banyak perkembangan khususnya pasca Perang Dingin (*Cold War*). Masalah keamanan merupakan salah fokus kajian yang sudah biasa dibicarakan oleh para penstudi Hubungan Internasional pada era ini. Studi keamanan (*security*) yang fokus utamanya kepada konflik, perang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan militer guna menciptakan kondisi aman ini telah mengalami perkembangan. Perkembangan ini salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan pola interaksi negara-negara dan kondisi globalisasi dunia saat ini.

Menurut *Collins* konflik yang terjadi tidak jarang melibatkan penggunaan ancaman militer atau kekuatan militer, inilah yang disebut upaya tradisional untuk mendapatkan keamanan. Ungkapan *Collins* tersebut kemudian menjadikan perbedaan antara isu keamanan tradisional atau konvensional yaitu yang berfokus hanya pada keamanan militer dengan isu keamanan non-tradisional atau non-konvensional yang mempunyai cakupan lebih luas ke arah keamanan non-militer.¹

Di dalam keamanan non-tradisional atau non-konvensional isu yang dibahas lebih luas yaitu meliputi isu ekonomi (krisis keuangan dan perkembangan

¹ Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 196.

ekonomi), dan keamanan politik dalam arti yang lebih luas meliputi: Hak Asasi Manusia, demokrasi, perusakan lingkungan, kejahatan internasional dll.²

Caballero and Anthony (2004) menyatakan terdapat tiga aliran pemikiran dalam konsep keamanan yaitu: Pertama, mencoba memperluas cakupan keamanan di luar keamanan militer antara lain termasuk politik, ekonomi, dan keamanan ekologi. Kedua, tetap mempertahankan status quo yaitu mengembalikan konsep keamanan menurut pemikiran realis atau neo-realis. Ketiga, harapan utama untuk memperluas paradigma keamanan di luar negara dan ancaman-ancaman militer termasuk proses untuk mencapai emansipasi manusia (*Human Emansipation*). Aliran pemikiran ketiga ini juga ingin memfokuskan keamanan kepada manusianya itu sendiri (*people-centered*) yaitu termasuk keamanan manusia (*Human Security*) dan tidak hanya berfokus kepada keamanan negara dan teritori (*state and territory*) saja.³

Menurut UNDP (*United Nations on Development Program*) keamanan manusia (*human security*) terdiri dari beberapa isu meliputi: *Economic Security, Food Security, Health Security, Environmental Security, Personal Security, Community Security, Political Security*. *Food security* dapat berupa ancaman kelaparan, penghancuran makanan akibat dari adanya konflik, adanya gangguan pasokan dan alokasi pangan, mal-nutrisi dan kelangkaan pangan: Ancaman ini merupakan ancaman utama manusia yang dapat mempengaruhi semua ancaman manusia yang lainnya. Salah satu strateginya yaitu: memiliki hak atas pangan,

² Luhulima, C.P.F. dkk. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 36.

³ Wonoadi, Grace Lestariana. 2008. "Putting People first: Toward A New Politics on Natural Disaster in Asia". *Asian Journal for Global Studies*. Vol. 1 No. 2. Dalam <http://ajgs.org/index.php/AJGS/article/view/16/62>. Diakses pada 25 Oktober 2014.

perkembangan atau pemberdayaan yang dilakukan sendiri, dan kemampuan untuk membeli melalui sistem distribusi pangan masyarakat.⁴

Isu ini menjadi sangat sensitif mengingat dapat menimbulkan gejolak dalam hubungan antar negara maupun dalam internal negara itu sendiri. Isu ini juga dapat memberikan efek domino terhadap bidang politik dan ekonomi.⁵ Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas isu keamanan pangan sebagai salah satu kajian dalam studi Hubungan Internasional. Terlebih lagi isu ini merupakan isu yang sangat sensitif karena pangan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar atau utama bagi kelangsungan hidup manusia.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang cukup beragam, unik secara budaya, agama, suku bangsa dan mempunyai berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Kawasan ini membentuk suatu organisasi regional yang disebut *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Walaupun negara-negara anggota mempunyai perbedaan satu sama lain namun secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. Di mulai dari pembangunan *confident building* (pembangunan kepercayaan) akhirnya ASEAN dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk memperluas kerjasama. Dengan mulai membentuk mitra dialog seperti: ASEAN + 3 (APT): China, Jepang, Korea Selatan, ASEAN-Eropa, *ASEAN Community*. Selain itu ASEAN juga membentuk kerjasama dalam berbagai bidang seperti *ASEAN Free*

⁴ Commission on Human Security (CHS): 2003: *4 in Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, hal 6.

⁵ Based on the UNDP Human Development Report of 1994 and the HSU-OCHA, *in Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, hal 7.

Trade Area (AFTA): bidang perdagangan, *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, *ASEAN Economic Community (AEC)*⁶. Peningkatan kerjasama dan mitra dialog dalam ASEAN merupakan suatu perkembangan yang cukup maju untuk menanggapi arus globalisasi yang terjadi pada situasi dunia saat ini.

Di bawah pertemuan Menteri ASEAN dalam bidang pertanian dan kehutanan (*ASEAN Ministry on Agriculture and Forestry/ AMAF*), ASEAN membentuk inisiatif sebuah kerjasama yang bernama *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* guna menangani isu keamanan pangan di regionalnya. Pembentukan kerjasama ini merupakan sebuah respon dari para negara-negara anggota terkait krisis pangan yang terjadi ditahun 2007-2008 yang menyebabkan harga pangan dunia semakin tinggi, dan juga faktor-faktor lain seperti semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, bencana alam yang semakin sering terjadi, perubahan iklim yang semakin ekstrem, serta kemiskinan yang menyebabkan semakin meningkatnya angka kelaparan dunia seperti yang dilansir oleh FAO dan WFP berikut ini:

FAO (*Food Agriculture Organization*) dalam *press release*-nya bersama-sama dengan WFP (*World Food Program*) pada bulan September tahun 2010 mengemukakan bahwa jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2010 mencapai 925 juta jiwa. Situasi ini diperparah dengan semakin berkurangnya investasi di sektor pertanian yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir, sementara sektor pertanian menyumbang 70% dari lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

⁶ Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 76-81.

⁷ <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=9&l=id> Diakses pada 6 November 2014.

Penyelenggaraan *World Summit on Food Security* pada bulan November 2009 menyepakati tentang *Declaration of the World Summit on Food Security* yang menitikberatkan pada pelaksanaan *Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security* yang menetapkan komitmen dan kesepakatan mengenai aksi bersama masyarakat global. Deklarasi ini juga menjadikan *Committee on World Food Security (CFS)* FAO sebagai platform internasional yang inklusif untuk menghadapi isu keamanan pangan dan nutrisi global, serta sebagai tujuan utama dalam proses menuju kemitraan global dalam bidang pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi.⁸

Isu keamanan pangan memang sangat sensitif melanda kawasan Asia Tenggara, mengingat kawasan ini sebagian besar negaranya merupakan negara berkembang yang masih mengandalkan bidang pertanian sebagai salah satu kekuatan negaranya. Terlebih lagi hanya ada dua negara penghasil utama beras seperti Thailand dan Vietnam di kawasan ini, meskipun Indonesia masuk kedalam kategori negara agraris namun beras domestiknya masih belum bisa melakukan ekspor yang lebih tinggi dari jumlah impornya seperti Thailand dan Vietnam.

Oleh karena itu dengan adanya kerjasama dalam bidang *food security ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* ini diharapkan akan dapat memberikan sarana terhadap negara-negara di regional ASEAN, khususnya Indonesia untuk dapat meminimalisir masalah dalam ketahanan pangan di negaranya.

⁸ Petranto, Ade. September 2011. "Peran Diplomasi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional". *Jurnal Diplomasi: Menjembatani wacana ke realita "Ketahanan Pangan dan Energi"*. Volume 3 No. 3. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 27.

Disamping itu, fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Indonesia dalam upaya menjaga dan memenuhi persediaan pangan negaranya, melakukan kebijakan impor dengan jumlah yang masih cukup tinggi terhadap produk-produk mendasar pertaniannya, seperti beras, kedelai, jagung, dan bahan pangan lainnya. Jika melihat hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita mengingat Indonesia sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), keadaan alam yang sangat subur, negara agraris dan juga memiliki perairan yang cukup luas (maritim) namun belum cukup mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk memperkuat ketahanan pangannya.

Berikut data yang menunjukkan bahwa volume impor Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2009-2012:⁹

Tabel 10. Volume Impor Komoditas Tanaman Pangan Indonesia, 2009 - 2012

No.	Komoditas	2009	2010	2011	(Ton)
					2012
					Tw. I
1	Beras Segar	250,225	687,582	2,744,002	770,295
2	Beras Olahan	51	1	259	12
3	Gandum Segar	4,666,418	4,824,049	5,648,065	1,382,187
4	Gandum Olahan	733,527	900,963	828,512	151,514
5	Jagung Segar	338,798	1,527,517	3,207,657	424,147
6	Jagung Olahan	82,433	259,294	103,327	26,676
7	Kacang Tanah Segar	194,002	229,393	251,004	47,146
8	Kacang Tanah Olahan	1,186	1,393	2,099	242
9	Kedelai Segar	1,320,865	1,740,505	2,088,616	374,870
10	Kedelai Olahan	22,145	32,158	36,896	4,316
11	Ubi Jalar Segar	51	32	25	6
12	Ubi Kayu Segar	1,903	21	6	-
13	Ubi Kayu Olahan	166,813	294,832	435,419	194,854
14	Lainnya	9,799	6,862	17,124	403
Total		7,788,215	10,504,604	15,363,009	3,376,666

Sumber : BPS, diolah Pusdatin

Keterangan : Data tahun 2009 s/d 2011 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTBMI 2007
Data tahun 2012 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2012 serta revisi cakupan terutama wujud olahan

⁹<http://cwts.ugm.ac.id/2013/07/kebijakan-perdagangan-dan-industri-dalam-mencapai-kedaulatan-pangan-di-indonesia-solusi-alternatif-darurat-menuju-daulat/> Diakses pada 6 November 2014.

Dari tabel di atas tampak bahwa jumlah impor Indonesia pada kebutuhan pangan selalu meningkat dalam kurun waktu 2009 sampai dengan awal tahun 2013. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan pangan domestiknya secara mandiri dan masih mengandalkan pangan impor. Oleh karena hal ini penulis tertarik ingin mendeskripsikan bagaimana peran *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* terhadap *food security* di Indonesia, dalam hal kerjasama bidang *food security* (ketahanan pangan) dan juga khususnya dalam meminimalisir isu kerawanan pangan pada hal persediaan, akses, pangan yang bergizi dan bernutrisi, upaya menjaga stabilitas pangan negaranya dan juga kondisi darurat di mana pangan harus segera ada seperti saat terjadinya bencana alam.

B. Tujuan Penelitian

Studi penelitian karya tulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk menunjukkan bahwa konsep “Keamanan” (*security*) dalam studi Ilmu Hubungan Internasional telah mengalami perluasan makna yaitu dari Keamanan Tradisional ke Keamanan Non-Tradisional yang salah satu cakupannya yaitu Keamanan Manusia (*Human Security*) yang di dalamnya terdapat beberapa isu, termasuk isu Ketahanan Pangan (*Food Security*) dan menurut saya isu ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai peran *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* sebagai sarana (wadah) kerjasama internasional anggota-anggota ASEAN guna untuk meminimalisir rentannya isu ketahanan pangan (*food security*) di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana cara Pemerintah Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik negaranya.
4. Untuk menjawab pokok permasalahan yang ada dengan teori atau konsep yang relevan dan membuktikan hipotesa yang penulis kemukakan.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- Apa peran *Asean Integrated Food Security (AIFS)* dalam meminimalisir rentannya ketahanan pangan (*food security*) di Indonesia tahun 2009-2013?

D. Kerangka Pemikiran atau Teori

Dalam penulisan karya tulis ini berikut beberapa kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis:

1. Konsep Kerjasama Internasional

Sebelum mendefinisikan konsep Kerjasama Internasional tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan dari studi Hubungan Internasional itu sendiri, karena konsep kerjasama internasional sangat erat kaitannya dengan hubungan antar negara-negara.

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi

dalam organisasi internasional dan sebagainya. Walaupun pada kenyataannya aktor yang paling efektif adalah negara, sehingga perilaku internasional yang paling banyak memperoleh perhatian para analis adalah perilaku negara, namun pengkaji dan ilmuwan hubungan internasional harus mempelajari apa saja yang bisa dipakai untuk memahami perilaku aktor-aktor itu dalam transaksi internasional.¹⁰

Hubungan Internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan juga cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antar negara, menciptakan hubungan antara mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu, hubungan akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor masyarakat.¹¹

Menurut *K.J. Holsti* yang mendefinisikan Kerjasama Internasional yaitu:

“sebagian besar transaksi atau interaksi dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai

¹⁰ Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi*. Jakarta: LP3ES.

¹¹ Morgenthau, Hans. J. 1982. *Perserikatan Bangsa-bangsa, Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional*. New York. Hal. 86.

masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, inilah yang disebut kerjasama”.¹²

Sedangkan *Dougherty* dan *Pfaltzgraff* menyatakan: sejak semula, fokus dari teori Hubungan Internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.¹³

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, di mana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-

¹² Holsti, K.J. 1980. *Politik Internasional Study Analisis II*. Jakarta: Erlangga. Hal 89.

¹³ Dougherty, James. E. And Robert L. Pfaltzgraff. 2000. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey (Paperback)*. United States: Published by Pearson. Hal 418. Dalam <http://www.amazon.com/Contending-Theories-International-Relations-Comprehensive/dp/0321048318>. Diakses pada 25 Oktober 2014.

kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.¹⁴

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerjasama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.¹⁵

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya, yaitu:¹⁶

- a. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
Banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

¹⁴ Ibid. Hal 418-419.

¹⁵ Ibid. Hal 419.

¹⁶ Holsti, K.J. 1995. *International Politics: A Framework for Analysis (7th Edition)*. Mishawaka, IN, USA. Hal 362-363. Dalam <http://trove.nla.gov.au/work/8304303>. Diakses pada 25 Oktober 2014.

- d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur, dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan akan mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna di mana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional yang anarkis ini.¹⁷

Diskusi mengenai kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh *John Ruggie* sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku

¹⁷Opcit. Hal 419-120.

yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk di dalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional.¹⁸

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Konsep kerjasama internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan.¹⁹

Suatu kerjasama internasional dapat terjadi karena didorong beberapa faktor berikut:²⁰

- a. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
- b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.

¹⁸ Ibid. Hal 420.

¹⁹ Ibid. Hal 420.

²⁰ Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Managing Indonesia's Transformation*. Hal 19. Dalam <http://www.suarnews.com/setelah-16-tahun-bersama-soeharto-ginanjar-akhirnya-buka-bukaan/138/>. Di akses pada 27 Oktober 2014.

- c. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
- d. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

2. Konsep Keamanan Pangan (*Food Security*).

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional konsep *Food Security* merupakan salah satu cakupan atau isu yang dibahas dalam konsep Keamanan Manusia (*Human Security*). Konsep *Food Security* mulai mengalami perkembangan karena adanya agenda pembangunan internasional pada tahun 1960-an dan 1970-an. Kepentingan umum dalam hal *food security* global dan domestik tumbuh pesat setelah krisis minyak dunia yang juga terkait krisis pangan pada tahun 1972-1974. dan kemudian pada tahun 1974 di Roma diadakan Konferensi Pangan Dunia (*World Food Conference*) untuk membahas isu Keamanan Pangan.²¹

Beberapa pakar seperti *Maxwell and Frankenberger* (1992) mengartikan *food security* sebagai “terjaminnya akses setiap saat untuk pangan yang cukup” istilah menjamin, akses, waktu, dan cukup secara khusus didefinisikan dalam definisi bervariasi misalnya, beberapa

²¹ http://www.toronto.ca/health/children/pdf/fsbp_ch_1.pdf Hal 1. Diakses pada 11 Oktober 2014.

memiliki perspektif pangan yang cukup berarti cukup untuk bertahan hidup, sementara yang lain, terutama yang mengusulkan definisi yang lebih baru dari ketahanan pangan, mengonsep sebagai cukup pangan untuk gaya hidup aktif dan sehat.²²

Sementara KTT Pangan Dunia (*World Food Summit*) mendefinisikan *food security* yaitu “Keamanan pangan ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat (yang kemudian diadopsi oleh Anderson, 2009)”²³.

“(Food Security exists when all people, at all times, have physical and economic acces to sufficient, safe and nutritious food meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life: Anderson 2009 (World Food Summit, 1996))”.

Dari definisi di atas, FAO (*Food and Agriculture Organization*) memberikan empat dimensi utama mengenai Keamanan Pangan (*Food Security*)²⁴:

1. Ketersediaan fisik pangan (*Physical “Availability” of Food*): Ketersediaan pangan yang menunjukkan "sisi persediaan" pangan dan ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat stok dan perdagangan bersih.
2. Adanya akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan (*Economic and Physical “Acces” to Food*): yaitu tercukupinya pasokan pangan di tingkat

²² Ibid.

²³ World Food Summit. 1996. In “*Food Security Information for Action Practical Guides*”: *The EC - FAO Food Security Programme is funded by the European Union and implemented by FAO*. Hal 1. Dalam Jurnal Diplomasi: Menjembatani Wacana ke Realita “*Jurnal Diplomasi: Menjembatani wacana ke realita “Ketahanan Pangan dan Energi”*”. Volume 3 No. 3. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

²⁴ Ibid. Hal 1-2.

nasional atau internasional tidak dengan sendirinya menjamin ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Kekhawatiran tentang akses pangan telah cukup mengakibatkan fokus kebijakan yang lebih besar pada pendapatan, pengeluaran, pasar dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan.

3. Adanya pemanfaatan pangan (*Food "Utilization"*): Pemanfaatan umumnya dipahami sebagai cara tubuh membuat sebagian besar berbagai nutrisi dalam makanan. Energi yang cukup dan asupan gizi oleh individu adalah hasil dari perawatan yang baik dan praktik pemberian makan, persiapan makanan, keragaman makanan dan distribusi intra-rumah tangga makanan. Dikombinasikan dengan pemanfaatan biologi baik dari makanan yang dikonsumsi, ini menentukan status gizi individu.
4. Adanya stabilitas pangan (*"Stability" of the Other Three Dimensions Over Time*): Bahkan jika asupan makanan Anda cukup hari ini, Anda masih dianggap rawan pangan jika anda tidak memiliki akses memadai ke makanan secara periodik, yang mempertaruhkan kemunduran status gizi anda. Kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi (pengangguran, kenaikan harga pangan) dapat berdampak pada status keamanan makanan Anda.

Food Security dan Food Sovereignty

Untuk mencapai *food security* suatu negara bisa saja mencapai *food security* yang baik diukur dari tingkat ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, walaupun kebutuhan akan pangan tersebut dipenuhi dengan cara membeli produk

pangan impor. Bagi negara kecukupan pangan yang menjamin, bahwa setiap individu akan mampu hidup sehat dan aktif saja seharusnya tidak cukup. Oleh karena itu, muncul konsep *food sovereignty* yang memberikan penekanan pada pentingnya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk impor.²⁵

Menurut *Windfuhr dan Jonsen* (2005: 15), "Sementara *food security* lebih dari konsep teknis, dan hak atas pangan yang legal, *food sovereignty* pada dasarnya adalah konsep politik." "*food sovereignty* adalah hak setiap negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan sendiri untuk memproduksi makanan dasar, menghormati keragaman budaya dan produktif. Kami memiliki hak untuk memproduksi makanan kita sendiri di wilayah kita sendiri. *Food sovereignty* merupakan prasyarat untuk keamanan pangan sejati." (*Via Campesina*, 1996: 1).²⁶

Berikut beberapa definisi *food security* dari berbagai lembaga yang saling keterkaitan:

a) *First World Food Conference 1974, United Nations, 1975.*

"*Food security*" adalah ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga.

²⁵ Hariyadi, Purwiyatno. September 2011. "Riset dan Teknologi Pendukung Peningkatan Kedaulatan Pangan". *Jurnal Diplomasi: Menjembatani wacana ke realita "Ketahanan Pangan dan Energi"*. Volume 3 No. 3. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 92.

²⁶ Lee, Richard. *Food Security and Food Sovereignty*: Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 11.

b) *Food and Agricultural Organization (FAO), 1992.*

“*Food security*” adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.

c) Bank Dunia (*World Bank*), 1996.

“*Food security*” adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

d) *OXFAM*, 2001.

“*Food security*” adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan control atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Dua kandungan makna yang tercantum di sini yaitu, ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas, dan akses dalam arti hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim.

e) *Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems (FIVIMS)*, 2005.

“*Food security*” adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi, memiliki akses atas pangan yang cukup, aman, bergizi, untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (*dietary needs*) dan pilihan pangan (*Food Preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.

F. Hipotesa

Hipotesa yang dapat di ambil dari hasil pemaparan di atas adalah:

- *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* berperan sebagai wadah atau sarana kerjasama internasional yang menangani isu *food security* di regional ASEAN.
- *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* berperan dalam mendorong Indonesia meminimalisir rentannya keamanan pangan dalam hal penyediaan, akses, pemanfaatan pangan dengan kandungan gizi dan nutrisi pangan dan upaya untuk menjaga stabilitas pangan domestik Indonesia melalui implementasi program-program AIFS.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis memberikan jangkauan penelitian yaitu semenjak isu ketahanan pangan mendapatkan perhatian serius dari negara-negara anggota ASEAN dengan mulai di selenggarakannya pertemuan khusus ke-29 yang diikuti oleh para Menteri ASEAN sektor pertanian dan kehutanan (*Special SOM-AMAF ke-29*) pada tanggal 5-7 Agustus tahun 2008 di Chiang Mai, Thailand yang membahas mengenai rumusan konsep kerangka *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* sampai dengan tahun 2012 yang merupakan periode implementasi program dan kegiatan bersama AIFS dalam mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN. Dan mengenai peran AIFS dalam meminimalisir masalah *food security* di Indonesia bidang pangan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013.

H. Metode penelitian

Metode penulisan karya tulis ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data studi kajian pustaka dari berbagai sumber seperti: buku – buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, news, surat kabar, koran, majalah dan media elektronik seperti website. Yang kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan penulisan karya tulis ini sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sesuai dengan objek yang ditulis.

I. Sistematika Penulisan

Setelah penelitian karya tulis ini selesai dilakukan, maka laporan akan di dokumentasikan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis yakni terdiri dari lima (5) bab pembahasan, yang terdiri dari sub-pokok bahasan dalam setiap babnya. Berikut isi dari setiap babnya:

BAB I Berisi tentang gambaran umum mengenai maksud, tujuan dan hasil yang hendak akan dicapai dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat isi mengenai Latar belakang, Tujuan Penulisan, Pokok Permasalahan, Kerangka pemikiran baik itu teori atau konsep, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Mendeskripsikan kondisi *food security* di kawasan ASEAN, isu-isu pokok terkait *food security* dikawasan ASEAN seperti aktifitas perdagangan, persiapan menuju komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) 2015, kemitraan global Indonesia terkait isu *food*

security dan keterlibatan Indonesia dalam pembentukan *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)*.

BAB III Berisi mengenai gambaran umum sejarah berdirinya, visi, misi, kerangka dan program-program *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* 2009-2013, kerangka pendukung AIFS: *Strategic Plan and Action on Food Security (SPA-FS)* 2009-2013, serta upaya-upaya ASEAN dalam menangani masalah *food security* di kawasan Asia Tenggara.

BAB IV Berisi mengenai gambaran umum isu *food security* di Indonesia, kondisi ketersediaan pangan Indonesia, permasalahan-permasalahan yang terkait ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia guna meminimalisir rentannya ketahanan pangan domestiknya di bidang pertanian dalam kurun waktu 2009-2013.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan, kritik saran dan jawaban atas pokok permasalahan.